
IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI KELUARGA SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK NAGAN RAYA

Lilis Sartika, Safrida*

Universitas Teuku Umar Aceh

Abstract

The rise of cases of sexual violence against children, the government of Nagan Raya Regency is here to help minimize the disaster through the realization of the Bangga Kencana program. The purpose of this research is to find out the implementation steps of the program in the field by referring to the Van Horn & Van Meter theory. The method used is a qualitative research method by collecting data through observation, documentation and the results of interviews with the government and the people of Nagan Raya Regency. The results of this study concluded that the implementation of Bangga Kencana through the formation of BKR, PIKR and GenRe groups was carried out by following the guidelines and directions from BKKBN although there were still some obstacles during the implementation of activities with cadre groups who were being fostered to become role models for other communities regarding the importance of awareness of understanding family functioning and sensitivity to protection against sexual violence experienced by children.

Keywords:

Bangga Kencana, Sexual violence, Children, Family

Abstrak

Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Kabupaten Nagan Raya hadir dalam membantu meminimalisir bencana tersebut melalui upaya perealisasi program Bangga Kencana. Tujuan penelitian ini guna mengetahui langkah implementasi program di lapangan dengan mengacu pada teori Van Horn & Van Meter. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi serta hasil wawancara bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi BANGGA KENCANA melalui pembentukan kelompok BKR, PIKR dan GenRe dijalankan dengan mengikuti pedoman dan arahan dari BKKBN meskipun masih ditemui beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan bersama kelompok kader yang sedang dibina untuk menjadi *role model* bagi masyarakat lain mengenai pentingnya kesadaran pemahaman akan fungsi keluarga dan kepekaan akan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh anak

Article history:

Submission Maret 18 2023

Revision April 20 2023

Accepted May 19 2023

Published June 30 2023

**Corresponding author*

Email: safrida1290@utu.ac.id

Kata Kunci: Bangga Kencana, Kekerasan seksual, Anak, Keluarga

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hidup dengan memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera adalah dambaan bagi setiap insan. Menurut Ariati (2010) dalam (Handayani et al., 2018) makna sejahtera memiliki arti yang berbeda sesuai dengan perspektif atau berdasarkan pemaknaan pandangan masing-masing. Keluarga yang sejahtera yakni yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak sebagaimana dijelaskan dalam UU No.10 Tahun 1992 yang diamandemenkan dalam UU No. 52 Tahun 2009. Keluarga menjadi salah satu *support system* dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter (Setiardi, 2017). Seperti halnya kewajiban mengimplementasikan fungsi keluarga untuk menjadi modal kehidupan keluarga yang tentram dan berkualitas.

Keluarga merupakan lingkungan yang menjadi madrasah pertama yang mengajarkan dan membentuk nilai-nilai pendidikan moral (Darmayanti, 2019). Menurut (Setiardi, 2017) pendidikan yang didapat dari dalam keluarga secara potensial akan membentuk kehidupan dan jalan berpikir bagi anggota keluarga terutama bagi seorang anak. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan". Komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak sangat krusial untuk terjalin agar anak dapat lebih terbuka terhadap orang tuanya (Erika Vivian Nurchahyati, 2022).

Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga yang holistik dan mampu mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga. Pemerintah mengeluarkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2020-2024. Program Bangga Kencana mempunyai tujuan dalam memanifestasikan keluarga yang sejahtera dan membangun keluarga aman dan tentram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang pembangunan keluarga yang berupaya dalam melahirkan keluarga yang bertaraf. Adapun slogan yang diterapkan oleh BKKBN untuk daerah di luar Aceh ialah "dua anak lebih baik" dan untuk daerah Aceh sendiri yaitu "dua anak lebih sehat".

Hadirnya Bangga Kencana adalah bentuk perluasan program pemerintah yang awalnya dinamai KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) sejak tahun 2020. Tujuan awal dibentuknya program tersebut yaitu mensejahterakan penduduk Indonesia agar terlepas dari garis kemiskinan melalui program KB (Keluarga Berencana). Seiring berjalannya waktu, KKBK yang berubah menjadi Bangga Kencana tampil dengan wajah baru yang sebenarnya juga bertujuan mengubah cara pandang masyarakat yang beranggapan BKKBN ialah program tawaran membunuh generasi akibat slogan dua anak lebih baik.

Program Bangga Kencana memiliki item-item yang menjadi focus pemerintah dalam mengimplementasikannya, yakni: *Pertama*, BKB (Bina Keluarga Balita) yaitu peningkatan kemampuan orangtua dalam tumbuh kembang balitanya melalui pola asuh yang benar seperti rangsangan fisik, motoric maupun kecerdasan. *Kedua*, BKR (Bina Keluarga Remaja) yang merupakan bentuk pembinaan dan pemberian pemahaman kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia remaja mengenai komunikasi yang baik antara orangtua dan anak dan memahami permasalahan yang kerap dialami oleh remaja tersebut. *Ketiga*, PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) adalah program yang dijalankan oleh, dari dan untuk remaja yang menyediakan pelayanan konseling dan informasi mengenai kehidupan sehat dalam dunia remaja baik reproduksi maupun kehidupan dalam keluarga. *Keempat*, GenRe (Generasi Berencana) yaitu kelompok remaja usia 10-24 tahun yang dibina oleh BKKBN untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan yang terencana, karir yang direncanakan dan pernikahan yang sesuai perencanaan. *Kelima*, BKL (Bina Keluarga Lansia), program ini bertujuan untuk membina keluarga bagi yang memiliki lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. *Keenam*, UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor) merupakan merupakan bentuk program yang mengajak keluarga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif melalui pemanfaatan sumber daya local.

Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya yang telah menjalankan regulasi dengan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat khususnya di kabupaten Nagan Raya terkait kesadaran tanggung jawab peran ayah, ibu, dan anak di dalam rumah tangga melalui penyuluhan Bangga Kencana. Program ini diberi tanggung jawab pada tupoksi BKKBN atau disebut juga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera. Melalui program Bangga Kencana, pemerintah Nagan Raya yang diwadahi oleh DPMGP4 membentuk Gampong KB (Keluarga Berkualitas) yang berjumlah 25 desa perwakilan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut. Tindakan ini sebagai pengaplikasian program Bangga Kencana yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan keluarga yang mampu dan tahu akan peran-peran mereka baik sebagai ayah, ibu maupun anak. Masyarakat di kampung-kampung KB adalah sebagai desa binaan sekaligus desa percontohan yang dibina langsung oleh BKKBN dengan diberi penyuluhan pada tiap-tiap kelompok akan fungsi-fungsi keluarga dan penyelenggaraan keluarga yang sejahtera dan berdaya.

Namun, berdasarkan observasi peneliti dalam penyelenggaraannya masih terdapat hambatan di lapangan yaitu terkait *mindset* masyarakat yang masih tabu dan beranggapan program ini hanya cocok untuk perempuan saja karena berbicara terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, fungsi keluarga dan perlindungan terhadap anak. Terlebih lagi munculnya jumlah kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak

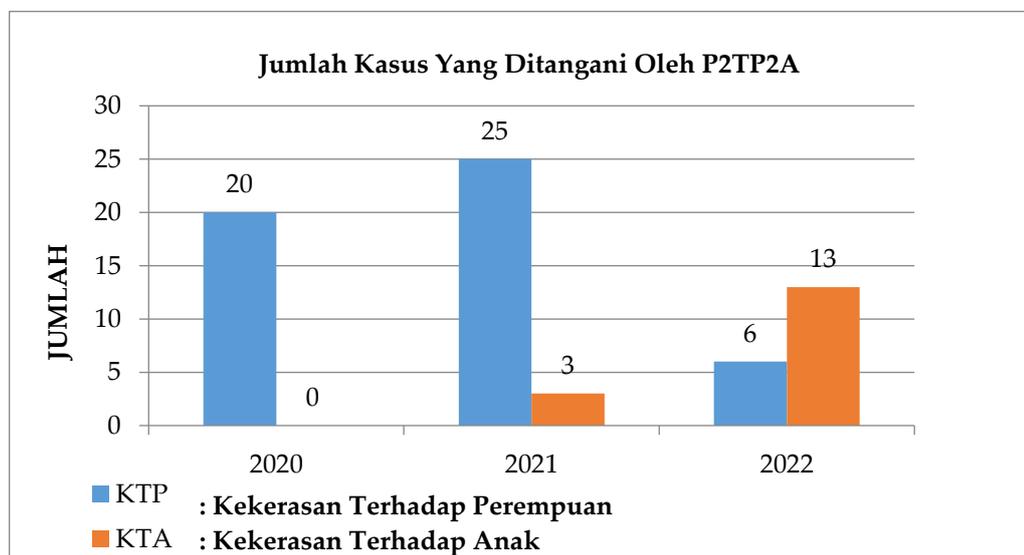
yang bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dan juga banyak masyarakat yang belum mengenali 8 fungsi keluarga. Padahal baik sang ayah, ibu maupun anak wajib memiliki pemahaman terkait fungsi keluarga sebagai tiang pertahanan dalam kesejahteraan keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi social budaya, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan (Hoesni & Firmansyah, 2020). Salah satu contohnya yaitu peran fungsi keluarga dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual melalui *sex education* yang diberikan di dalam lingkup keluarga (Handayani et al., 2018). Bahkan menurut penelitian (Verheyden et al., 2022) penelantaran dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak salah satunya terjadi karena kelalaian dari kedua orang tuanya.

Munculnya permasalahan anak yaitu kasus kekerasan seksual yang semakin bertambah dan kasus kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak (Nurhidayah & Ligina, 2018). Walaupun berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani kasus tersebut, penyakit tersebut tetap terjadi secara global (Turner et al., 2022). Namun interpretasi dalam meminimalisir kejahatan seksual melalui sebuah kebijakan yang membawa perubahan social ialah bentuk nyata kontribusi perlindungan anak (Bentivegna & Patalay, 2022). Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) bahwa kekerasan seksual pada anak adalah interaksi seksual yang melibatkan anak dan orang yang lebih dewasa, orang asing maupun saudara kandung dengan menjadikan anak sebagai obyek pemuas nafsu. Adapun yang termasuk ke dalam kekerasan seksual yaitu, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, eskploitasi seksual, prostitusi paksa dan lain sebagainya (Pranita, 2021).

Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwasanya kekerasan seksual yang terjadi di rumah mencapai (48,7%) dan ini menjadi presentase tertinggi kekerasan seksual pada anak (Septiani, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi orang tua sangatlah dibutuhkan, namun sebagian orang tua dan lingkungan masih tabu dan canggung untuk berbicara terkait pendidikan seksual (Joni & Surjaningrum, 2020). Lingkungan tempat tinggal yang mempunyai stigma patriarki yang kuat dapat menyebabkan ancaman terutama pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai *victim blaming* (korban yang disalahkan) (Wyatt, 2022). Peran orang tua dalam keluarga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak begitu penting (Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, 2021).

Seperti halnya Kabupaten Nagan Raya memegang angka tinggi tingkat kekerasan pada perempuan dan anak sepanjang Januari-oktober 2022. Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, AKP Machfud menyampaikan ada sekitar 8 kasus pemerkosaan dan 6 kasus pelecehan yang dilaporkan. Pelaku 99 persen nya adalah orang

terdekat korban. Selain itu, bukan hanya kasus kekerasan seksual saja, namun kekerasan lainnya juga dialami oleh perempuan dan anak di Nagan Raya yaitu sebanyak 18 kasus padahal pada tahun 2021 hanya ada 1 kasus yang dilaporkan.



Gambar 1. Jumlah Kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh P2TP2A

Sumber : DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya

Grafik diatas merupakan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil pelaporan yang diterima. Berdasarkan pernyataan Kepala seksi Tindak Pidana Kajari Nagan Raya, kasus pencabulan anak di Nagan Raya meningkat akibat terobsesi film porno dan angka tersebut mencapai 10 perkara. Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, AKP Machfud juga menyebutkan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan didominasi oleh perempuan dan anak dibawah umur (Detikcom, 2019).

Maka dari itu Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) hadir dalam memprioritaskan perwujudan peningkatan kualitas keluarga dalam melahirkan norma-norma (Utami Tri Ajeng et al., 2020). Dalam system keluarga yang menjadi sorotan adalah keluarga menyediakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya sehingga mampu melahirkan bahwa fungsi keluarga itu dapat dipandang dan dicerna sebagai konsep multidimensi (Herawati et al., 2020).

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis yaitu penelitian (Murni, 2017), (Zahirah et al., 2019), (Rochaniningsih, 2014). Ketiga penelitian tersebut membahas terkait kedudukan penting fungsi keluarga dalam menangani degradasi moral pada anak. Di dalam penelitian tersebut banyak membahas peran keluarga atau orang tua dalam melahirkan keluarga berkualitas serta membahas kendala dalam

mewujudkan fungsi-fungsi keluarga sehingga menyebabkan banyaknya terjadi penyimpangan dan permasalahan social yang kerap dialami oleh seorang anak. Adanya penelitian tersebut menjadi rujukan bahwasanya di zaman sekarang peran orang tua begitu krusial dalam melindungi anak nya sehingga tidak terjebak ke dalam penyimpangan seperti kekerasan seksual. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan terkait peran program Bangsa Kencana dalam mewujudkan fungsi keluarga yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan uraian tersebut untuk melahirkan keluarga yang holistic dengan penerapan fungsi keluarga guna melindungi anak dari kekerasan seksual tentu saja membutuhkan langkah inovatif seperti implementasi kebijakan program Bangsa Kencana di Kabupaten Nagan Raya. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program tersebut dalam upaya menghadirkan keluarga yang mampu mengimplentasikan 8 fungsi keluarga sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Dalam perumusan suatu kebijakan apabila kurang diberi perhatian maka implementasinya tidak akan berjalan efektif dan apabila kebijakan tidak dijalankan dengan baik maka akan munculnya (*impelentation gap*) atau kesenjangan implementasi (Lukitasari et al., 2017).

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) kebijakan yang diimplementasikan menjadi gagal karena factor perencanaan yang tidak matang atau karena keadaan lainnya (Nurdin, 2019). Maka dari itu, beberapa variable yang perlu diperhatikan dalam pengimplemtasian sebuah kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu: 1). Standar dan sasaran Kebijakan. Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus mempertimbangkan sasaran dan kejelasan target atau tujuannya; 2). Sumber Daya Kebijakan. Sumber daya dalam proses penerapan kebijakan tidak hanya berasal dari sumber daya manusia, melainkan juga ketersediaan finansial, sarana atau fasilitas; 3). Aktivitas Pelaksanaan dan Komunikasi antar organisasi. Implementasi dapat berjalan sia-sia apabila penyampaian informasi dalam suatu organisasi tidak berjalan baik dalam setiap aktivitas pelaksanaan; 4). Karakteristik Badan Pelaksana. Hal ini berkaitan dengan kompetensi badan pelaksana baik dalam pembuatan keputusan, hingga keterbukaan komunikasi; 5). Keadaan ekonomi, social, politik. Keadaan ini melihat kepada kondisi social ekonomi di lapangan yang berlaku hingga kepentingan suatu kelompok dalam menyukseskan kebijakan tersebut; 7). Sikap Pelaksana. Memahami terkait kebijakan yang diputuskan dan respon implementator dalam memainkan peranan penting.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bangsa Kencana Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Upaya Pencegehan Kekerasan Seksual Anak di Nagan Raya” guna

mengetahui lebih dalam terkait tahap-tahap perencanaan dan perubahan yang terjadi di lapangan dari implementasi program Bangga Kencana dalam mewujudkan peranan keluarga terhadap kekerasan seksual pada anak. Kemudian, melalui penelitian ini pula dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan kebijakan program tersebut agar dapat menjadi referensi perbaikan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya karena menjadi salah satu kabupaten yang telah mensosialisasikan program Bangga Kencana tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program Bangga Kencana dalam mewujudkan fungsi keluarga sebagai pencegahan kekerasan seksual pada anak serta nantinya dapat diketahui kekurangan dan kelebihan serta perencanaan program yang terdapat dalam implementasi program tersebut. Maka, penelitian ini mengarah kepada bentuk metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci dengan menafsirkan suatu fenomena yang diteliti berdasarkan pengumpulan data suatu latar (Albi Anggito, 2018). Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi metode yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan sumber dan data yang telah ada. Penentuan informan penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling* atau menurut kriteria. Informan adalah orang yang diminta memberi informasi pada saat diwawancara dan mampu menguasai terkait informasi, data ataupun fakta dari objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Muhammad Rizwan, S.Ag, Kasi keluarga sejahtera DPMGP4
2. Mashito, S.KM, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4
3. Rita Afrina, PLKB Kuala Pesisir
4. Friad Ramadhan, Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya
5. Sarifah Marzani, Wakil Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya
6. Marlina, Bendahara PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu Nagan Raya
7. Hesti Idawati, Ketua BKR Kasih Sayang Desa Langkak Nagan Raya
8. Fitriana, S.K.M, PKB Ahli Pertama Kecamatan Kuala
9. Shely Muna, S.I.Kom, PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer (melibatkan beberapa pihak DPMGP4 dan masyarakat desa di Kabupaten Nagan Raya) dan data sekunder didapatkan melalui studi literature e-journal dan dokumen pemerintahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono, 2020)

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, maka peneliti akan menjelaskan terkait implementasi program Bangga Kencana mewujudkan fungsi keluarga sebagai pencegahan kekerasan seksual anak di Nagan Raya dengan merujuk pada variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam pengimplemtasian sebuah kebijakan antara lain:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Para pelaksana kebijakan dituntut untuk dapat mencapai standar dan siapa atau apa sasaran yang ditargetkan dari sebuah kebijakan, dan implementasi suatu kebijakan tersebut juga berpotensi gagal apabila implementator tidak memahami target yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri. Keberhasilan program dianggap berhasil ketika sebuah program atau kebijakan yang terealisasikan sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan menjadi hal wajib yang harus terpenuhi (Safrida, 2021). Tentunya dalam sebuah implementasi kebijakan, masyarakat dapat merasakan *output* dari sebuah program yang telah direncanakan (Mita, 2010). Sama halnya dengan program Bangga Kencana yang direalisasikan untuk keluarga-keluarga yang tanggung jawab ini dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera atau yang disebut juga BKKBN.

Bangga Kencana merupakan arah kebijakan BKKBN dalam mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden RI 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Salah satu target yang ingin dicapai oleh BKKBN adalah mewujudkan keluarga yang *holistic integrative* melalui pembentukan karakter dalam keluarga dengan strategi mewujudkan keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga sesuai siklus hidup serta meningkatkan kualitas hidup remaja dan membentuk karakter moral sejak dini di lingkup setiap keluarga (Mardiya, 2020). Pada berbagai item program Bangga Kencana yang ditawarkan memiliki kekurangan maupun kelebihan dalam setiap penyelenggaraannya.

Pihak BKKBN sendiri memilih beberapa desa di Kabupaten Nagan Raya yang dijadikan sampel untuk pengaplikasian program ini. Melalui bantuan PLKB di setiap Kecamatan, BKKBN dapat terbantu dalam pendataan jumlah masyarakat yang dapat ditempatkan atau dijadikan sebagai kader di beberapa item program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizwan selaku Kasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 mengatakan:

Jika memfokuskan pada program pencegahan kekerasan seksual pada anak, maka ini mengacu pada item BKR, PIKR dan GenRe karena kader yang terlibat di BKR yaitu orangtua yang memiliki remaja, sedangkan untuk PIKR dan GenRe kadernya ialah para remaja yang belum menikah. Para kader ini diberi penyuluhan oleh PLKB Kecamatan dan

OPD KB agar menerapkan fungsi-fungsi keluarga, berbicara permasalahan dan pergaulan remaja serta kader ini dibimbing secara matang untuk mampu menjadi konselor yang siap memberi layanan konseling bagi orang lain (Wawancara Selasa, 22 November 2022).

Maka, para organisasi pelaksana telah menentukan kelompok yang berbeda yang cocok untuk ditempatkan pada beberapa item program. Melalui kerjasama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di tiap kecamatan dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) bersama-sama mendata masyarakat di desa KB masing-masing untuk mengelompokkan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kriteria yang dapat bergabung ke dalam berbagai program Bangga Kencana, agar kelompok yang dibina sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Hal serupa juga dibenarkan oleh Fitriana selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Kuala bahwa:

Sebelum kita melaksanakan kegiatan sosialisasi program, terlebih dahulu PLKB mendata di desa KB masing-masing siapa-siapa saja yang orang tua yang memiliki remaja di keluarganya akan dimasukkan ke dalam kelompok BKR, bagi remaja-remaja yang belum menikah di bawah usia 25 tahun masuk ke dalam kategori PIKR, dan setiap perwakilan PIKR desa akan diminta bergabung ke dalam organisasi GenRe kabupaten. (Wawancara Senin 02 Januari 2023).

Setelah tahap pendataan serta perekrutan dilakukan, PLKB kemudian membentuk kelompok kader yang diawali dengan pertemuan pengenalan program Bangga Kencana, lalu tugas-tugas dari setiap kelompok kader, baru setelah itu PKB memberi ruang dan jadwal penyuluhan. Sependek pengetahuan masyarakat sebelumnya hanya mengetahui Bangga Kencana ialah program pil KB saja, namun pemahaman tersebut telah jauh diterima oleh masyarakat di desa. Pertemuan awal begitu penting untuk menciptakan kesan kepada masyarakat guna menjalin komunikasi lebih mendalam bersama badan pelaksana dan penerima manfaat itu sendiri.

Sumber Daya Kebijakan

Masing-masing item Bangga Kencana mempunyai penanggung jawab di bidangnya masing-masing yang mendampingi tiap kelompok di desa binaan. Seperti PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang bertugas mendampingi BKR, PIKR dan GenRe Kabupaten didampingi oleh OPD KB. Berbicara terkait keluarga dan pencegahan kekerasan seksual pembahasan ini sejalan dengan program Bina keluarga Remaja (BKR), PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan Genre (Generasi Berencana). Setiap target kegiatan yang dilaksanakan di desa akan dilaporkan oleh PKB melalui aplikasi *New Siga* kepada pihak provinsi demi menjamin kesuksesan pelaksanaan dan dijadikan bahan evaluasi di lapangan. Ketiga organisasi itu berfokus pada permasalahan-permasalahan social. Sebagaimana yang disampaikan oleh Shely Muna selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan bahwasanya:

Pembina kader memberikan penyuluhan kepada BKR tentang KB, fungsi keluarga dan peran orang tua, kelompok PIKR dengan pembekalan pergaulan remaja, mengenali pendidikan seksual dan dilatih menjadi konselor rekan sebaya, sedangkan GenRe juga berbekal modul pembelajaran dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN yang memfokuskan pada kesehatan reproduksi, sex education, perencanaan pendidikan hingga mengenali resiko kehidupan pernikahan. Kami selaku PKB yang wajib berasal dari kalangan PNS turut mendampingi sebagai konselor ahli. (Wawancara, Rabu 28 Desember 2022).

Melalui modul kurikulum standar ini, para penyuluh akan lebih mudah membimbing para kelompok kader tahap per tahap bab pembelajaran yang ingin disampaikan, dan penyuluh akan bertindak sebagai konselor dan pendamping ahli mengingat belum adanya psikolog yang dihadirkan langsung oleh Kabupaten Nagan Raya. Berikut ialah nama-nama desa KB yang dipegang langsung oleh penanggung jawab yang berasal langsung dari DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 1.

Daftar Kampung KB Kabupaten Nagan Raya dan Penanggung Jawab

No.	Kecamatan	Gampong	Penanggung Jawab	No. Hp
1.	Beutong Ateuh	1. Kuta Teungeh	Desi Anggarini	085261488990
		2. Blang Puuk		
2.	Beutong	1. Bumi Sari	Mu Musliadi Cut Ella Aguswandi	082272724222
		2. MeunasahTeungoh		
		3. Blang Semot		
3.	Seunagan Timur	1. Pulo Teungeh	Marliana Dian Isanubari Suhaibah	082272449503
		2. Suak Peureubong		
		3. Keude Linteung		
4.	Seunagan	1. Krueng Ceh	Sy. Mardhian Safitri Shely Muna Nur laila	08116873300
		2. Alue Dodok		
		3. Padang		
5.	Suka Makmue	1. Alue Peusaja	Ira Yulisa Sri Wahyuni	085275057378
		2. Seumambek		
6.	Tadu Raya	1. Gunong Pungki	Samsul Rizal Samsul Rizal T. Benuita	082160770091
		2. Simpang Jaya		
		3. Cot Mue		
7.	Kuala Pesisir	1. Purwosari	Rita Afrina Nur Arza Eva Sovia	082273734051 085260812916
		2. Langkak		
		3. Pulo		
8.	Kuala	1. Lawa Batu	Fitriana	085277512352
9.	Tripa Makmur	1. Babah Lueng	Aja Fatimah Ajis	08527710165 085260668610
		2. Ujong Krueng		
10.	Darul Makmur	1. Puloe Kruet	Efridar Nursidar Saifuddin	0852777346084
		2. Simpang Dua		
		3. Makarti Jaya		

Sumber: BKKBN Kabupaten Nagan Raya

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rita Afrina selaku PLKB Kuala Pesisir bahwasanya:

Dalam mencapai keberhasilan tujuan program Bangga Kencana, setiap kecamatan di Nagan Raya memiliki satu sampai dua desa yang dijadikan kampung KB atau kampung Keluarga Berkualitas. Penyuluhan yang dilaksanakan dalam rangka menyalurkan edukasi jarak kehamilan supaya menerapkan slogan dua anak lebih sehat demi menghindari kesenjangan ekonomi serta mengedukasi remaja dan orang tua tentang konsekuensi dari pernikahan usia dini. Hal ini juga dilakukan atas pertimbangan masih banyak ketidaktahuan orang tua maupun remaja akan fungsi-fungsi keluarga yang paling penting adalah komunikasi awal kita dalam menjelaskan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat untuk dijalankan. (Wawancara Senin, 19 Desember 2022).

Berbicara terkait sumber daya kebijakan tidak hanya membahas mengenai sumber daya manusia. Tetapi sumber daya finansial memegang peranan penting dalam berbagai kebijakan seperti perealisasi sebuah program. Berdasarkan data primer yang di dapatkan oleh peneliti ialah kelompok atau kader yang ingin melaksanakan kegiatan belum mendapatkan dana khusus dari desa maupun dinas dalam pemberian tunjangan kepada kader layaknya kader posyandu yang memiliki gaji di tiap bulannya. Jika kelompok kader ini ingin melaksanakan bentuk sosialisasi ataupun kegiatan lainnya di bantu oleh PLKB di desa masing-masing dan adapula yang memakai uang pribadi untuk menyalurkan sebuah kegiatan. Para Pembina hanya dapat menyediakan bentuk bantuan berupa biaya konsumsi pada saat keberlangsungan kegiatan, namun untuk insentif atau gaji untuk kader yang dimaksud belum dapat terpenuhi sebagaimana permintaan para kader. Kegiatan biasanya dilakukan di desa masing-masing dengan tempat yang disediakan oleh pemerintah desa dan pernah juga dilakukan di luar desa misalnya mereka di undang ke Dinas namun partisipasi masih terbilang kurang.

Aktivitas Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi menjadi salah satu factor penentu keberhasilan program yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdaan Perempuan sebagai Dinas yang berperan dalam melaksanakan program Bangga Kencana dengan dibantu oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera atau disebut juga BKKBN. Pihak BKKBN Kabupaten Nagan Raya berkoordinasi dengan (OPD-KB) Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana tiap desa lalu, Keuchik dan PLKB untuk mengatur jadwal kunjungan lapangan dengan kader lalu PKB sebagai penyuluh aktif kader menulis target kerja kemudian melaporkan mengenai keberhasilan di lapangan berdasarkan kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Van Horn & Van Meter bahwasanya tidak hanya konsisten dalam komunikasi yang penting dilakukan, tetapi aktivitas kebijakan yang ingin

diimplementasikan harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Sama seperti BKR, PIKR dan GenRe menyusun aktivitas pelaksanaan keaktifan kelompok ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan aktif lainnya.

- Bina Keluarga Remaja (BKR)

Sebagai upaya menghadirkan kesadaran akan pentingnya terjalin hubungan harmonis antara orang tua dan anak, BKKBN Kabupaten Nagan Raya membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif tersebar di desa-desa KB. Kegiatan yang melibatkan keluarga yang memiliki remaja tersebut dibentuk guna mendapatkan informasi secara meluas melalui bimbingan dari fasilitator BKKBN yaitu PLKB kecamatan dan PKB ahli. Adapun tujuan utama dibentuknya kader-kader BKR ialah sebagai respon pemerintah bahwa untuk menciptakan keluarga dengan konsep multidimensi orang tua dan anak harus bekerja sama dalam keluarga, tahu betul mengenai fungsi-fungsi keluarga dan yang begitu krusial ialah komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak. Sebagaimana penyampaian Mashito, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

Untuk mewujudkan 8 fungsi keluarga butuh kerjasama yang baik antara ibu, ayah dan anak. Fungsi keluarga jika hanya dijalankan oleh orang tua saja namun anak tidak menerapkannya maka tidak akan membuat keluarga tersebut sejahtera. Orang tua yang memberikan contoh-contoh penerapan 8 fungsi keluarga itu dan sang anak mencontoh dan mempraktikkannya. (Wawancara Jumat 25 November 2022).

Maka dari itu, anak dan orang dituntut mampu memahami dan mengerti keadaan satu sama lain tanpa egois. PKB sebagai penanggung jawab pelaporan kegiatan juga menyediakan modul 1001 berbicara yang menyangkut cara didik orang tua terhadap anaknya yang kebanyakan menerapkan pola asuh yang otoriter. Modul ini berisikan bagaimana membangun relasi yang kuat dengan sang anak serta memahami isi hati remaja yang berdampak pada kehidupan remaja itu sendiri begitu pula perilaku baik sang anak kepada ibu bapak nya. Shely Muna, selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan menyampaikan hal yang sama bahwa:

Tantangan besar mengedukasi kelompok BKR ialah ketika kita berbicara tentang sex education dan menyamakan persepsi akan hal yang dianggap tabu itu sedikit menjadi kendala, terlebih orang tua merasa mereka lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam keluarga. Selain karena cara pandang yang berbeda, BKR bersifat non profit yang membuat kader kurang berminat untuk bergabung. (Wawancara, Rabu 28 Desember 2022).

Selain itu pula, keterangan yang bersumber dari data primer peneliti menunjukkan masyarakat telah memiliki perspektif yang melekat bahwa berbicara *sex education* antara orang tua kepada anaknya merupakan hal yang tidak perlu, misalnya

tentang kesehatan reproduksi, mereka menganggap anak-anak akan tahu dengan sendirinya tanpa harus diajarkan oleh orang tua dan mereka juga bingung dan malu untuk menyampaikannya. Serupa yang disampaikan oleh Hesti Idawati Ketua BKR Kasih Sayang Desa Langkak yaitu:

Pembimbing BKR telah banyak menyampaikan materi-materi pengasuhan tumbuh kembang remaja, mulai dari cara memperkenalkan anak tentang pergaulan remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan tentunya orang tua diberi ruang untuk bertanya ataupun berkonsultasi apabila mengalami kesulitan dalam mengasuh anak. Namun, untuk tingkat partisipasi kader yang konsisten bergabung ke BKR sangat sedikit karena sebagian kader menghrarapkan adanya instentif (gaji) seperti kader posyandu di desa". (Wawancara Senin 26 Desember 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut ditemukan kekurangan di lapangan yakni badan pelaksana telah menyediakan fasilitas baik materil maupun imateril namun ketercapaian konsistensi oleh kader BKR masih menjadi kendala. Maka, diharapkan badan pelaksana yang bertanggung jawab dapat melakukan pendekatan agar diberi pengertian bahwa BKR akan sangat berguna bagi petunjuk arah kehidupan mereka meskipun untuk awal ini insentif yang diharapkan belum dapat terpenuhi. Melalui pendekatan tentunya kegiatan BKR dapat dibarengi dengan kegiatan masyarakat lainnya seperti pelaksana kebijakan ikut bergabung ke dalam kelompok wirid yasin guna menjalin komunikasi lanjut dengan masyarakat dan memanfaatkan waktu berkumpul bersama dengan sedikit membahas edukasi untuk kelompok BKR.

- **Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR)**

Selain BKR, BKKBN Nagan Raya juga membentuk kelompok remaja di desa berusia 10-24 tahun (belum menikah) bergabung ke dalam organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). PIKR dikelola oleh kader-kader yang bertugas menyebarkan rangkaian informasi mengenai siklus kehidupan remaja yang aktif dan positif, yang mana tugas PIKR sebagai ialah sebagai konselor rekan sebaya di desa. Organisasi ini memiliki Pembina dari PLKB di kecamatan masing-masing. Setiap pertemuan Pembina terlebih dahulu memaparkan materi dari modul pembelajaran kepada remaja bagaimana gambaran siklus pertumbuhan remaja itu sendiri, yang mana secara perlahan memperkenalkan value diri yang harus seorang remaja miliki terutama dalam mebelah hak-hak dalam dirinya. Seperti hak berpendidikan, hak hidup dan hak pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun.

PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) memiliki tiga tujuan utama yang harus mereka kampanyekan kepada remaja lain yakni pendewasaan usia perkawinan, berkeluarga bagi remaja dan keterampilan hidup (Life Skills). Remaja yang tergabung sekaligus dilatih mental untuk berani bersuara atas setiap penyimpangan hak anak.

Mereka harus bisa mengenali berbagai jenis pelecehan dan kekerasan seksual yang bahkan banyak yang tidak menyadarinya apalagi di dalam dunia pergaulan mereka sendiri. Karena kekerasan seksual bahkan bisa terjadi dalam hubungan pacaran hingga pada hubungan pernikahan (Irene Dawaa, 2022).

Seperti yang disampaikan oleh Marlina, selaku Bendahara PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu menyebutkan bahwa:

Di dalam PIKR, kami selaku kader diberi ilmu pengetahuan akan dunia remaja, misalnya mencegah terjadinya pergaulan bebas dan sebagai PIKR kita diberi pelatihan sebagai konselor supaya rekan sebaya yang mempunyai permasalahan keluarga atau masalah percintaan dapat bercerita ke PIKR dan kita bantu mencari solusi bersama sama. Tujuannya agar remaja sekarang ini berani berbicara apapun permasalahan yang mereka alami tanpa harus ada ketakutan, karena pernah ada yang curhat tentang orang tua yang menyuruh mereka menikah setelah tamat SMA padahal mereka ingin kuliah. (Wawancara, Selasa 27 Desember 2022).

Maka, kehadiran PIKR sangat membantu anak mempunyai tempat berlindung apabila lingkungan keluarga bukan lagi menjadi tempat yang aman. Tidak hanya itu, GenRe juga turut andil dalam membantu kader PIKR secara immaterial karena kedua organisasi ini sama-sama bertugas sebagai konselor yang memeberi layanan konseling. kelompok ini juga dibina sesuai dengan modul dan kurikulum pembelajaran yang telah disusun oleh BKKBN. PKB kecamatan akan terus memantau berapa target yang telah disusun yang mampu diwujudkan pada desa-desa yang terpilih serta memantau kinerja aktif dari kelompok PIK R itu sendiri. PKB dan PLKB saling berkoordinasi dalam memegang peran sebagai konselor dan fasilitator.



Gambar 1. Kelompok PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu

Sumber : Data Primer Peneliti, 2022

Prinsip dari kelompok PIKR yang terbentuk di desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini yaitu menjalani pembinaan, mengikuti arahan, lalu menerapkan.

Sebagaimana prinsip yang dianut maka menjadi tugas berat yang dipikul oleh kader-kader tersebut yaitu sebagai *role model* bagi banyak remaja lainnya. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Mashito juga menyebutkan bahwa:

Suara anak memiliki kekuatan yang begitu besar, jika orang tua yang berbicara tentang apa keinginan anak mereka orang bisa saja tidak percaya, namun jika anak yang berani speak up tentang apa yang mereka butuh, apa yang mereka rasa apalagi jika berbicara mengenai hak-hak anak, potensi untuk didengarkan dan diwujudkan jauh lebih besar” (Wawanacara Jumat 25 November 2022).

Melalui kelompok ini, tentunya remaja-remaja lebih mampu terbuka akan permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan yang ingin dicapai ialah para remaja secara tidak langsung terbimbing dan terarahkan oleh rekan sebaya mereka terutama kehidupan pergaulan di zaman sekarang ini. Sedikit banyaknya pengetahuan yang didapatkan dari PIKR dapat membantu generasi-generasi muda sekarang ini terutama di Nagan Raya mampu berpikir lebih cerdas akan arah-arah hidup, pendidikan dan pernikahan yang serba terencana. Karena remaja kebanyakan lebih nyaman untuk bercerita dengan rekan sebayanya daripada orang tuanya sendiri. PIKR yang terbentuk di desa-desa Kabupaten Nagan Raya secara langsung mendidik rekan seperjuangan mereka tanpa merasa ragu dan canggung untuk saling berbagi masalah.

- **Generasi Berencana (GenRe)**

Selain BKR dan PIK-R, pemerintah juga membentuk GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan kelompok remaja kabupaten kebanyakan berasal dari anggota PIK-R di desa-desa. Anggota GenRe yang tergabung merupakan remaja yang belum menikah dengan usia 10-24 tahun. Tujuan utama dibentuknya GenRe yaitu menciptakan karakter bangsa yang berkualitas dengan edukasi stop pernikahan dini, stop NAPZA, dan stop seks pra nikah. Program GenRe mengedepankan kontribusi remaja yang aktif menyiapkan pendewasaan usia dalam memilih dan memilah terutama jenjang kehidupan, pendidikan, karir dan pernikahan dengan bentuk perencanaan matang sehingga mewujudkan generasi berencana yang sehat dan produktif.

Organisasi GenRe yang terbentuk di Kabupaten Nagan Raya bertugas memberi sosialisasi kepada remaja-remaja di Kabupaten seperti di sekolah-sekolah menenengah dalam rangka menekan angka pernikahan dini dengan menghidupkan generasi-generasi muda yang peka dan berani menyuarakan isu pelecehan dan kekerasan seksual yang bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. GenRe di Kabupaten juga bertugas sebagai pembimbing dan konselor kelompok PIKR yang ada di desa-desa. Salah satu perwakilan forum Genre yaitu Sarifah Marzani selaku Wakil Ketua Genre Nagan Raya, mengatakan:

Forum Genre dibina langsung oleh pihak BKKBN terkait tugas utama di dalam organisasi tersebut, yaitu mengembangkan karakter bangsa dan menjadi contoh remaja yang sehat dengan mencegah serta menjauhi 3 permasalahan yaitu, seks bebas, perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan napza. Forum Genre Kabupaten Nagan Raya juga melakukan beberapa kali pertemuan dengan PIKR untuk saling sharing pengetahuan tentang remaja sehingga sebagai generasi muda kita semua saling bekerja sama dalam menghidupkan karakter anak bangsa". (Wawancara Kamis, 24 November 2022).

Melalui forum ini, pemerintah merasa terbantu karena anak sendiri lah yang menjadi actor terdepan sebagai agen pelopor dan pelapor dalam membantu generasi muda yang berencana lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk masa depan yang serba terencana. Genre merangkul anak-anak ataupun remaja dengan sukarela secara tegas berani menolak jika dipaksa menikah di usia dini, dan berani tegas menuntut hak berpendidikan dalam hidupnya. Sesama remaja, mereka menyebarkan informasi bahaya pernikahan dini yang dapat berefek pada kesehatan mental apalagi menikah dalam keadaan yang tidak siap karena usia yang muda dan masih belum merencanakan kehidupan di dalam rumah tangga. Demi menyuarakan makna kesehatan reproduksi, OPD KB selaku Pembina memberi penyuluhan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia belia dan kemudian sang ibu hamil, hal itu akan membuat potensi bayi yang dilahirkan menjadi *stunting* serta berpotensi menjadi keluarga yang mengalami kesenjangan social dan ekonomi. Selain itu moral-moral pergaulan bagi remaja juga begitu ditekankan apalagi banyak di kalangan mereka yang berpacaran.



Gambar 2. GenRe Kabupaten Nagan Raya

Sumber : Data Primer Peneliti, 2022

Tugas GenRe mempromosikan bagaimana seharusnya remaja yang sehat, remaja yang hebat dan yang berprestasi. Mereka menjadi teladan yang baik melalui bimbingan OPD KB dari BKKBN, pesan-pesan pembelajaran yang telah mereka terima harus benar-

benar tersampaikan ke remaja lainnya. Pernyataan dari Ketua GenRe Kabupaten Nagan Raya menyebutkan:

Dapat bergabung ke dalam organisasi GenRe merupakan pengalaman yang luar biasa, dan ilmu yang didapatkan membawa begitu banyak inspirasi. Kita selaku GenRe harus menjadi role model bagi teman-teman seperjuangan di luar sana, mengingat kenakalan hingga kekerasan terus menghantui remaja-remaja kita sekarang ini. Meskipun GenRe telah terbentuk dengan pembekalan yang luar biasa, namun aktivitas semakin berkurang karena pendamping tidak seaktif pada saat di awal dulu, kami harapkan dengan semangat anak-anak GenRe, pembimbing juga dapat lebih semangat membantu menghidupkan aktivitas seperti dulu yang begitu aktifnya". (Wawancara Rabu 30 November 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, para pelaksana program atau Pembina dapat berperan sebagai *support system* yang baik, melihat keinginan dari GenRe yang semangat dalam menjalankan tugasnya. Apabila tidak adanya *support system* maka keberlangsungan program berpotensi lebih kecil untuk terus dikembangkan. Ide-ide keberlanjutan program perlu di evaluasi kembali agar keaktifan pelaksanaan selalu dapat bergerak ada atau tidaknya Pembina kader dan pastinya program tidak dijalankan sebagai formalitas pelaporan saja. Bagaimanapun juga GenRe masih memerlukan banyak pendampingan dan ilmu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Karakteristik Badan Pelaksana

Berbicara keberhasilan program maka tidak terlepas dari tanggung jawab badan pemangku kebijakan. Karakteristi badan pelaksana dituntut bagaimana arah respon mereka dalam melihat dan mengevaluasi proses kebijakan yang sedang diimplementasikan. Karakteristik dari badan pelaksana merupakan tolak ukur dalam menjamin keberhasilan suatu program. Dalam perumusan sebuah kebijakan, proses evaluasi menjadi point penting yang perlu dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk menemukan kekurangan, kelebihan maupun dampak dari program yang telah dijalankan (Permatasari, 2020).

BKKBN kabupaten Nagan Raya sebagai badan pelaksana menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti melibatkan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk diberi ilmu agama bagi masyarakat yang ingin menikah, belum menikah dan yang sudah menikah. Pihak KUA turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat ramai baik ayah ibu atau anak tentang kehidupan berumah tangga yang baik dan bekal bagi calon-calon pengantin agar lebih mengerti peran dalam menerapkan fungsi keluarga terutama dalam fungsi keagamaan. Namun, seperti pada tahap-tahap kegiatan pembinaan bagi GenRe dan PIKR yang mana kelompok ini dituntut menjadi konselor seharusnya memiliki Pembina yang juga ahli secara ilmu dan pengalaman di dalam mendidik watak seseorang seperti seorang psikolog, tetapi dalam praktiknya belum sesuai dengan

rancangan yang seharusnya berlaku. Karena yang bertindak sebagai konselor untuk PIKR dan GenRe hanya pihak OPD-KB dan PLKB Kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh Rita Afriani selaku PLKB Kuala Pesisir bahwa:

Dalam membina GenRe serta PIK-R seharusnya kita di dampingi oleh Psikolog, namun pihak kabupaten kita belum memiliki psikolog yang dapat didatangkan langsung dalam membina kelompok remaja tersebut. Dinas akan mengupayakan kedepannya agar dapat memawa psikolog mendampingi dan memberi binaan langsung kepada PIK-R. Untuk PIK-M sendiri belum dibentuk kelompok tetap dan aktif seperti PIK-R” (Wawancara 19 Desember 2022).

Para pelaksana telah berusaha hadir sebagai fasilitator maupun konselor yang kompeten, meskipun psikolog belum dapat tergabung ke dalam pelaksanaan program tersebut. Seperti halnya kehadiran PKB yang diwajibkan berasal dari kalangan PNS dan mempunyai tanggung jawab besar mewujudkan target yang ditetapkan oleh pihak provinsi, maka yang bertugas sebagai PKB ialah ahli-ahli yang diikat tugas nya dengan Perban bkkbn Nomor 3 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Hal serupa juga disampaikan langsung oleh Fitriana selaku Ahli Pertama Kecamatan Kuala:

Sebagai PKB yang turut membantu PLKB di desa-desa, kita ditugaskan melaporkan setiap kemajuan, target dan kegiatan seperti apa yang berhasil dilaksanakan di aplikasi New SIGA, karena sebagai pemangku kebijakan kita wajib tahu kekurangan dan kelebihan di lapangan sebagai bahan evaluasi kedepannya”. (Wawancara Senin 02 Januari 2023).

Maka dari itu, badan pelaksana berupaya mencapai target program Bangga Kencana dengan terus memantau perkembangan di lapangan. Adapun kekurangan dan kelebihan yang ditemukan menjadi bahan evaluasi bagi para implementator yang bertugas guna sebagai bahan rujukan pada pencapaian target program berikutnya. Hasil evaluasi hendaknya menjadi referensi perbaikan selama pelaksanaan kegiatan di lapangan, tidak hanya masyarakat yang perlu dibenahi namun keseriusan badan pelaksana juga turut diperhatikan. Karena mereka menjadi penggerak utama program Bangga Kencana ini. Upaya pembenahan kekurangan dan kelebihan melalui evaluasi mesti dibarengi dengan kekompakan dan komunikasi erat antara para pemangku kebijakan dan pemanfaat.

Keadaan ekonomi, social, politik

Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Nagan Raya yaitu BKKBN dalam menempatkan keberhasilan program Bangga Kencana tidak terlepas dari berbagai kendala baik dari sumber daya hingga dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Pernyataan Muhammad Rizwan selaku Kasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 memaparkan

Masyarakat yang kita perkenalkan tentang Bangga Kencana terutama kelompok BKR telah lebih dahulu memegang prinsip bahwa program ini bukan sesuatu yang urgent untuk perlu disosialisasikan dan pemahaman social seperti itu sulit untuk kita perjelas lebih jauh tentang fungsi-fungsi keluarga yang mana ayah, ibu dan anak sekalipun perlu memiliki komunikasi yang terarah dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang holistik nan sejahtera dan bagi PIKR dan GenRe harus kita pelajari teknik berbicara dengan para remaja agar kita dapat masuk ke dunia remaja itu berpikir sehingga mereka dapat merasakan bahwa program ini benar-benar membawa manfaat". (Wawancara Selasa, 22 November 2022).

Pemahaman masyarakat kita sekarang ini terlebih lagi di perdesaan masih tabu jika berbicara tentang pendidikan seksual, penyempurnaan 8 fungsi keluarga dan masyarakat yang kebanyakan bersifat patriarki memiliki cara pandang yang kurang tepat akan kasus-kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Kabupaten Nagan Raya itu sendiri. Padahal Bangga Kencana hadir sebagai media untuk mencerdaskan dan memberdayakan keluarga untuk lebih peka akan tanggung jawab satu sama lain, tidak hanya orang tua tetapi anak sebagai anggota keluarga yang juga berhak atas keluarganya. Ketidaktahuan tersebut tersebut lah yang membuat pengenalan program dari nol berubah menjadi tantangan yang besar di lapangan.

Selain permasalahan social yaitu *mindset* masyarakat yang masih awam, hambatan di segi ekonomi pelaksanaan program telah dirasakan para pelaksana kebijakan pada kelompok BKR khususnya yang terdiri dari kader ayah ibu dan anak. Kader-kader yang terlibat kurang berpartisipasi dalam kegiatan disebabkan tidak adanya dana insentif. Shely Muna selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan menegaskan:

Kader-kader yang bergabung sebagai BKR mengharapkan adanya gaji bulanan yang sama seperti di dapatkan oleh kader-kader posyandu, dan telah disampaikan juga sebelumnya bahwa BKR bersifat non profit. Namun ini menjadi permasalahan juga terhadap partisipasi masyarakat untuk bisa konsisten dan aktif sebagai kader". (Wawancara, Rabu 28 Desember 2022)

Pihak PLKB maupun PKB sendiri mencoba mencari solusi terhadap keluhan insentif yang mereka terima. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa, namun belum ada biaya khusus yang dapat dikeluarkan untuk memberikan gaji bulanan kepada kader-kader tersebut selayaknya kader posyandu. Tidak dapat dipungkiri, kecemburuan social diantara masyarakat akan jelas sangat terlihat apalagi kader BKR dan posyandu sama-sama petugas di desa yang menjalankan kegiatan yang memberi manfaat untuk masyarakat. Secara pandangan social, insentif dapat menjadi hambatan besar dalam mewujudkan sebuah organisasi yang ingin bergerak secara aktif.

Maka permasalahan ini secepatnya dibahas dan diharapkan dapat menawarkan solusi berdasarkan musyawarah rapat kinerja pelaksanaan program Bangga Kencana tersebut.

Sikap Pelaksana

Salah satu sikap pelaksana yang mempengaruhi terjalankan atau tidaknya sebuah program ialah tingkat intensitas respon para implementator. Se jauh mana mereka mau dan terus berkomitmen menyukseskan implementasi kebijakan. Sama halnya dengan Bangga Kencana yang telah disusun sedemikian rapi namun tanpa adanya bentuk evaluasi dari pemangku kebijakan, program menjadi sulit mencapai kepada tujuan-tujuannya. Kendala yang kerap ditemui ialah bentuk keaktifan kegiatan dari program-program tersebut. Sebagaimana telah disampaikan oleh Marlina, selaku Bendahara PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu menyebutkan bahwa:

Kelompok PIKR kurang aktif disebabkan kegiatan yang monoton membuat aktivitas kurang dapat dinikmati, padahal pembelajaran yang diajarkan begitu menarik dan penting untuk diketahui oleh remaja, dan diharapkan pula kegiatan lebih dijadwal karena jika kegiatan yang dilaksanakan bersama PLKB dan PKB setahun hanya tiga kali saja dalam setahun para kader PIKR menjadi bosan dan kami belum mampu untuk bergerak secara mandiri". (Wawancara Selasa 27 Desember 2022).

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jalannya suatu program tidak hanya berpaku pada kemauan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, melainkan peran implementator menghidupkan sebuah program yang lebih unggul dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang menjadi target itu merupakan hal yang tidak kalah penting. Masyarakat juga akan dapat menilai apakah badan pelaksana benar-benar serius menjalankan Bangga Kencana tersebut atau sekedar formalitas. Kedekatan para implementator dengan masyarakat sasaran menjadi point utama bahkan sebelum peluncuran sebuah program, terlebih ini dilaksanakan di desa-desa. Sikap pelaksana dalam melakukan pendekatan awal berguna menarik perhatian target sasaran. Apalagi BKR, PIKR dan GenRe melibatkan pihak-pihak penting yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Serupa pula yang disampaikan oleh Friad Ramadhan selaku Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwasanya:

Sekarang ini forum genre tidak seaktif saat awal pembentukan kepengurusan, hal ini disebabkan pergantian petugas posisi pendamping sehingga forum menjadi kurang terawasi. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kegiatan genre lainnya yang biasanya rutin dilakukan bersama anak-anak dan remaja menjadi tidak teratur jadwalnya. Diharapkan implementator kebijakan yang bertanggung jawab mendampingi forum ini dapat lebih konsisten dalam menggerakkan keaktifan organisasi tersebut. Selain itu, kita juga terkendala dalam menyusun kegiatan atau jadwal terencana sehingga menyulitkan pergerakan kinerja organisasi secara aktif". (Wawancara Rabu 30 November 2022).

Maka diharapkan para implementator mampu lebih jauh menampilkan arah respon serta memainkan peranan yang penting, baik dari pihak BKKBN, PLKB Kecamatan, PKB hingga pihak pemerintah desa setempat. Setidaknya setiap kali pertemuan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kegiatan dengan kedua belah pihak yaitu pihak pelaksana dan masyarakat sebagai kader. Upaya menyatukan persamaan persepsi untuk keberhasilan program ini tentunya harus kuat berasal dari keinginan kedua belah pihak. Seperti para kader sampaikan sebenarnya Bangsa Kencana ini membawa begitu banyak perubahan pola pikir orang-orang tentang peka akan fungsi keluarga dan kekerasan seksual terhadap anak. Namun apa yang mereka sampaikan adalah hal yang menjadi pertimbangan utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bangsa Kencana dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Nagan Raya nyatanya baru diterapkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa KB saja. Namun prealisasi program ini di beberapa desa terpilih sudah menjadi referensi kedepannya bagi pemerintah yang telah melihat berbagai dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut.

Beberapa kelompok PIKR, BKR dan GenRe yang ada di desa KB memiliki kegiatan aktif dan terdapat pula masyarakat di desa lainnya masing kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bangsa Kencana. Namun setidaknya kalangan remaja yang terlibat ke dalam kelompok PIKR dan GenRe telah mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan tambahan ilmu mengenai *sex education* dan kepekaan akan kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Tetapi belum semua remaja berani untuk speak up mengenai hal ini pada saat berada di dalam forum.

Sedangkan kelompok BIKR yang partsipannya adalah ibu-ibu lebih monoton dalam melaksanakan kegiatan. Masalah utamanya tidak adanya uang transportasi atau gaji bagi kader yang terlibat sehingga ibu-ibu disana masih beranggapan adanya perbedaan antara posisi kader BIKR dan kader posyandu yang di gaji setiap bulannya. Kemudian masalah yang paling urgent yaitu mindset masyarakat yang tabu menjadi tantangan tersendiri bagi para implementator kebijakan untuk menjalankan program Bangsa Kencana pada kelompok BKR, PIKR, dan GenRe, terlebih lagi Kabupaten Nagan Raya masih belum bisa menyediakan Psikolog sebagai pelayanan konseling bagi masyarakat dan kader.

REFERENSI

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ella Deffi Lestari (ed.); Kesatu). CV Jejak.

- Bentivegna, F., & Patalay, P. (2022). The impact of sexual violence in mid-adolescence on mental health: a UK population-based longitudinal study. *The Lancet Psychiatry*, 9(11), 874–883.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif (Kedua)*. Kencana.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15>
- Darmayanti, H. (2019). Keluarga Sebagai Madrasah Pertama dan Optimalisasi Fungsi Edukatif Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Edukatif*, V(1), 58–65.
- Detikcom, T. (2019). *Sepanjang 2019, Kasus Pencabulan Anak di Nagan Raya Aceh Meningkat*. [https://News.Detik.Com/Berita/d-4825728/Sepanjang-2019-Kasus-Pencabulan-Anak-Di-Nagan-Raya-Aceh-Meningkat](https://news.detik.com/berita/d-4825728/sepanjang-2019-kasus-pencabulan-anak-di-nagan-raya-aceh-meningkat).
- Erika Vivian Nurchahyati, M. L. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 4(1), 104–115.
- Handayani, A., Yulianti, P. D., & Ardini, S. N. (2018). Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga. *J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 76.
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihastuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227.
- Hoesni, F., & Firmansyah. (2020). Analisis Ketahanan dan 8 Fungsi Keluarga di Provinsi Jambi Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 4(1), 88–100.
- Irene Dawaa, M. G. (2022). Violence Against Women. In *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict* (Third Edit, Vol. 2). Elsevier.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20–27.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121.
- Mardiya. (2020). *Memahami Arah Kebijakan Strategi Bangsa Kencana 2020 - 2024*. Kulonprogokab.Go.Id.
<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1034/memahami-arrah-kebijakan-strategi-bangsa-kencana-2020-2024>
- Mita, M. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.

- Murni, S. (2017). Optimalisasi Pengawasan Orang Tua terhadap Bahaya Pelecehan Seksual pada Anak di Era Digital. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 152–156.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Kesatu)*. Maulana Media Grafika.
- Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109.
- Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1).
- Pranita, E. (2021). *15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>
- Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, W. F. (2021). Pola pendidikan agama islam pada anak korban keluarga broken home. *Jurnal Imtiyaz*, 5(02), 64–76.
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 59–71.
- Safrida, N. (2021). Implementasi Kampus Merdeka : Implikasi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Barat. *Indonesian Journal of Teaching and Teacher Education*, 1(1), 19–28.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); Ketiga). Alfabeta CV.
- Turner, E., Cerna-Turoff, I., Nyakuwa, R., Nhenga-Chakarisa, T., Muchemwa Nherera, C., Parkes, J., Rudo Nangati, P., Nengomasha, B., Moyo, R., & Devries, K. (2022). Referral of sexual violence against children: How do children and caregivers use a formal child protection mechanism in Harare, Zimbabwe? *SSM - Qualitative Research in Health*, 2(September), 100184.
- Utami Tri Ajeng, N., Alawiya, N., & Musyahadah, A. (2020). Peran Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Mewujudkan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana “Bangga Kencana.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers*, 317–326.
- Verheyden, C., Van Dooren, E., Van Holen, F., Stroobants, T., & Vanderfaeillie, J. (2022). Child abuse and neglect in Brussels during the Covid-19-lockdown. *Child Abuse and Neglect*, 134(March), 105903.

Wyatt, Z. (2022). A Vulnerable Nation: The Intersection of Rural Poverty, Cultural Norms and Gender-Based Violence in Cambodia. *Asian Journal of Social Science Studies*, 7(5), 55–65.

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.